**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Efektivitas Pengelolaan Dana BOS**
2. **Konsep Efektivitas**

Menurut Mardiasmo efektivitas “merupakan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”.[[1]](#footnote-1) Selanjutnya menurut Hans Kartikahadi yang telah dikutip oleh Sukrisno Agus yaitu “efektivitas adalah produk kegiatan operasi telah mencapai tujuan baik ditinjau dari segi kualitas kerja, kualitas hasil kerja, maupun batas waktu yang telah ditargetkan”.[[2]](#footnote-2)

Menurut The Liang Gie mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka seorang dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.[[3]](#footnote-3)

Slamer Saksono mengatakan bahwa pengertian efektivitas merupakan salah satu dari dua unsur utama dalam konsep produktivitas. Dimana dalam konsep produktivitas mengandung dua unsur utama yaitu efisiensi dan efektivitas.[[4]](#footnote-4) Efesiensi dijadikan sebagai pengukur tingkat sumber daya baik manusia, keuangan, maupun alam yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki, sementara efektivitas mengukur hasil dan pelayanan yang dicapai hasil tersebut.

Di samping itu juga Hendayaningrat menjelaskan bahwa efektivitas adalah “pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”.[[5]](#footnote-5) Sementara konsep lain dikemukakan oleh Hidayat bahwa efektivitas adalah “suatu ukuran yang menyatakan beberapa tingkat (kualitas, kuantitas, waktu) yang telah dicapai.”[[6]](#footnote-6)

Dari beberapa uraian di atas penulis dapat menguraikan bahwa efektivitas adalah tujuan yang dicapai dalam tingkat kualitas dan waktu kerja yang bersesuaian dengan kegiatan operasi dengan kata lain hasil yang maksimal untuk setiap usaha yang dilakukan.

1. **Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**
2. **Deskripsi Pengelolaan Dana BOS**

Pengelolaan adalah manajemen. Manajemen diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Istilah biasa dikenal dalam ilmu ekonomi yang memfokuskan pada profit (keuntungan dan komoditas komersial)[[7]](#footnote-7)

Manajemen dalam arti luas, menunjuk pada rangkaian kegiatan, dari perencanaan akan dilaksanakannya kegiatan sampai penilainnya. Manajemen dalam arti sempit, terbatas pada inti kegiatan nyata, mengatur atau mengelola kelancaran kegiatannya, mengetur kecekatan personi yang melaksanakan, pengaturan sarana pendukung, pengaturan dana, dan lain-lain, tetapi masih terkait dengan kegiatan nyata yang sedang belangsung.

1. **Mekanisme Pengelolaan**
2. Tim PKPS-BBM mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim PKPS-BBM propinsi dan kabupaten / kota, kemudian menetapkan alokasi dan BOS tiap propinsi.
3. Atas dasar jumlah siswa di sekolah, tim PKPS-BBM pusat membuat dana BOS tiap propinsi dituangkan dalam DIPA propinsi.
4. Tim PKPS-BBM kabupaten dan kota diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa sekolah.
5. Tim PKPS-BBM kabupaten /kota, menetukan sekolah yang bersedia menerima dana BOS melauli surat keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh kepala Dinas pendidikan kabupaten/ kota, kepala Kandepag kabupaten / kota dan dewan pendidikan dengan dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan ysng diterima sekolah bersedia menerima BOS harus menanda tangani surat perjanjian pemberian bantuan.
6. Tim PKPS-BBM kabpaten / kota mengirimkan daftar sekolah ke tim PKPS-BBM propinsi, tebusan ke Pos/ank dan sekolah penerima BOS.
7. **Mekanisme Pencairana Dana BOS**
   1. Pencairan dana BOS dilakukan langsung di KPPN Kab/Kota dengan mengikuti mekanisme pencairan DIPA, yaitu dengan mengacu pada peraturan Dirjen perbendaharaan Nomor PER/066/PB/2005.
   2. Jika sekolah ingin menggunakan dana BOS untuk kegiatan diluar belanja barang non operasional lainnya sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan BOS, maka dipersilahkan dengan melakukan revisi DIPA terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dalam Rencana Anggaran dan kegiatan sekolah (RAKS) /RAPBM Revisi DIPA BOS dapat diproses melalui Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, termasuk revisi ke belanja modal.
   3. Pengambilan dana BOS oleh bendahara pengelola BOS, dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pencairan dana BOS dari rekening sekolah kepada bendahara pengeluaran yang diketahui oleh kepala kepala sekolah dan komite sekolah.
   4. Jika jumlah dana BOS yang dilokasikan pada DIPA sekolah negeri lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalanya akibat kesalahan,/perubahan data jumlah siswa, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke Kasa Negara.
   5. Jika sampai akhir tahun anggaran dana BOS masih tersisa direkening sekolah, maka sisa dana tersebut di setor ke Kas Negara.[[8]](#footnote-8)

**4 . Mekanisme Pengambilan Dana BOS**

1. Tim PKPS-BBM propinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada kantor pos /bank pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana.
2. Selanjutnya kantor pos /bank yang ditunjuk mentransfer dan sekaligus setiap rekening sekolah, dan masuk kedalam pos penerimaan di dalam RAPBS.
3. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak seharusnya melalui sejenis rekomendasi/ persetujuan manejer atau tum PKPS-BBM kabupaten/ kota.
4. Dana Bos harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh PKPS\_BBM kabupaten /kota dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun.
5. Penyaluran dana BOS secara bertahap (dua atau tiga bulan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tersebut dalam setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam RAPBS. Bilamana terdapat sisa dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor di kas Negara).
6. **Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Penggunaan dana BOS di sekolah/ madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah/ Madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari PEMDA atau sumber lain (block grant, hasil unit produksi, sumbangan).

Dalam pengelolaan dana BOS ada beberapa indikator-indikator yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Planning (Perencanaan)

Drs A. W. Widjaya mengemukakan bahwa perencanaan adalah “kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam administrasi.”[[9]](#footnote-9) Rencana merupakan serangkaian keputusan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Perencanaan yang baik hendaknya diarahkan pada tujuan *(Goald oriented).* Rencana yang jelas adalah:

1. Apa yang akan dicapai berkenan dengan penentuan tujuan.
2. Mengapa hal perlu dilakukan berkenan dengan alasan atau motif.
3. Bagaimana akan dilaksanakan berkenan dengan prosedur kerja sasaran dan biaya.
4. Bilamana akan dilaksanakan berkenan dengan penjadwalan kegiatan kerja atau pelaksanaan kerja atau pelaksanaan kegiatan hingga selesai.
5. Siapakah yang akan melaksanakan berkenan dengan orang-orang yang turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan mengadakan penilaian, berkenan dengan kegiatan, mana yang telah selesai, sedang dan akan di selesaikan.
6. Kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat dipengaruhi pelaksanaan dan kegiatan mengadakan penyesuain dan perubahan rencana.[[10]](#footnote-10)
7. Organizing (Pengorganisasian)

Drs. A. W. Widjaya “setelah menyusun rencana, selanjutnya diperlukan penyusunan /pengelompokan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan yang akan dilaksanakan dalam rangka usaha kerja tersebut.”[[11]](#footnote-11) Perlu pengaturan, ada beberapa jenis kegiatan, dikelompok-kelompokkan hubungan antara jenis kelompok masing-masing.

Menurut Drs A. W Widjaya “pengelompokkan kegiatan tersebut berarti juga pengelompokkan tanggung jawab, pembagian dan penyusunan tugas-tugas bagi setiap bagian yang mempunyai tugas tertentu.”[[12]](#footnote-12)

1. Aktuating (Pengarahan/ pelaksanaan)

Drs Nurjaka : “Aktuating merupakan tindakan yang mengusahaan agar semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk menyelenggarakan tugas pekerjaannya, sehingga selesai sesuai dengan tujuan yang diharapakan.”[[13]](#footnote-13) Di samping itu juga Drs.A. W. Widjaya mengemukakan kegiatan yang menjadi acuan dalam tingkat pelaksanaan atau pengarahan adalah:

1. Memberikan penerangan, penjelasan, informasi tentang hubungan secara menyeluruh terhadap tujuan yang hendak dicapai.
2. Mengeluarkan peraturan, perintah, instruksi dalam rangka pelaksanaannya yang baik.
3. Memberikan contoh-contoh dalam cara bekerja dan memperlihatkan sikap yang baik.
4. Mengadakan pengawasan.
5. Dapat mengemukakan kebaikan dan kebutuhan atau kekurangan dalam pekerjaan secara objektif
6. Mengadakan koreksi terhadap kekurangan atau kelemahan dan meniadakan hambatan dan rintangan.[[14]](#footnote-14)
7. Controling (Pengawasan)

Menurut Drs. Nurjaka “*controlling* adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi apabila diperlukan supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana.”[[15]](#footnote-15)

1. Evaluasi (Penilaian)

Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan dan dapat memperoleh suatu informasi dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. Penilaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Apakah program tersebut diperlukan atau perlu disempurnakan atau diperbaiki.
2. Apakah sesuai dengan sasaran, apakah pekerjaan sesuai dengan apa yang direncanakan.
3. **Tujuan Dan Arti Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Proram BOS merupakan peluang besar untuk menjadi sarana percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Menurut berbagai studi salah satu hambatan terbesar dalam penuntasan wajib belajar adalah masalah ekonomi dan biaya pendidikan yang dinilai sangat berat bagi semua kalangan masyarakat. Program BOS direncanakan untuk membebaskan iuran sekolah bagi siswa-siswa yang tergolong miskin dan meringankan bagi siswa yang lainnya di seluruh sekolah setingkat SD dan SMP. Melaui pendanaan sekitar Rp 11 triliun pertahun, seharusnya program BOS dapat berperan besar dalam wajib belajar pada tahun 2013/2014.

Dalam keterangan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama biaya satuan pendidikan (BSP) adalah “besarnya biaya yang diperlukan rata-rata siswa tiap tahun sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.”[[16]](#footnote-16) Dari cara penggunaan BSP dibedakan menjadi BSP investasi dan BSP operasional.

Di samping itu juga keterangan kementrian pendidikan nasional dan kementerian agama BSP infestasi adalah “biaya yang dikeluarkan setiap siswa pertahun untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis dipakai dalam waktu lebih dari satu tahun.”[[17]](#footnote-17) Misalnya untuk mengadakan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP operasional adalah biaya yang dikeluarkan persiswa tiap tahun untuk menyediakan sumber daya “pendidikan yang habis pakai digunakan satu tahun atau kurang, BSP operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil”

Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama menyatakan bahwa biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan guru honor kelebihan jam mengajar (KJM) Guru tidak tetap (GTT) pegawai tidak tetap (PTT) uang lembur dan pengembangan profesi guru (pendidikan dan pelatihan (Diklat) guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKS), Kelompok Kerja Guru (KKG).[[18]](#footnote-18)

Biaya non personil adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), evaluasi / penilaian, perawatan, / pemeliharaan, daya dan jasa pembinaan kesiswaan rumah tangga sekolah dan supervisi.

Senada dengan di atas bantuan operasional (BOS) yang dimaksud dalam PKPS-BBM bidang pendidikan ini secara konsep mencakup komponen biaya operasional dan non personil. Hasil studi badan penelitian dan pengembangan Kementrian pendidikan Nasional (BALITBANG DEPDIKNAS). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata Nasional, maka pembiayaan dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam kegiatan personil dan biaya investasi.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kulaitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran.[[19]](#footnote-19)

Nanang Fatah berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan professional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.[[20]](#footnote-20)

Penggunaan dana BOS ditetapkan bukan atas dasar opini atau kemauan guru, tetapi didasarkan pada tujuan. Dana BOS merupakan dana yang diperuntukan bagi dana personil. Selanjutnya kementrian pendidikan nasional dan Kementrian Agama menjelaskan bahwa tujuan “untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.[[21]](#footnote-21) Kementerian pendidikan nasional dan kementrian agama sebagai salah satu program diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu adalah program BOS. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses program BOS juga merupakan program untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing serta daya sekolah, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan operasional sekolah merupakan program pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan cara memberikan subsidi pendidikan kepada siswa SD dan SMP agar memperoleh pendidikan yang lebih bermutu dan berkualitas. Dengan adanya program ini diharap dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah di Indonesia.

1. **Bentuk-Bentuk Program Dana BOS**
2. **Macam-Macam Program BOS**

Kemeterian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama sejak bulan Juli 2005, pemerintah telah meluncurkan program ini kepada seluruh sekolah setingkat SD dan SMP se-Indonesia dengan tujuan meringankan atau dengan kata lain menggratiskan biaya sekolah yang selama ini ditanggung oleh masyarakat, salah satu komponen pembiayaan sekolah yang cukup besar adalah pembiayaan buku pelajaran yang memenuhi standar mutu yang berlaku. Jika dana BOS digunakan untuk memenuhi seluruh buku pelajaran siswa, maka sebagian dana akan terserap untuk pembelian buku. Oleh karena itu pada tahun 2006 pemerintah memberikan subsidi buku kepada seluruh sekolah setingkat SD dan SMP yang menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa program BOS terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Program BOS reguler yaitu program yang diperlukan untuk membiayai dana operasional sekolah khususnya dana non personil sekolah.
2. Program BOS buku yaitu program yang diperuntukan dalam pengadaan buku-buku pelajaran sekolah.[[22]](#footnote-22)
3. **Sekolah Penerima BOS**

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama menjelaskan bahwa sekolah yang dapat menerima dana BOS adalah:

1. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh dana BOS
2. Sekolah yang kaya, mampu secara ekonomis saat ini memiliki dana lebih besar dari BOS berhak untuk menolak”[[23]](#footnote-23)
3. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh dana BOS, khusus sekolah swasta harus memilikiijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah yang bersedia menerima dana BOS harus menanda tangani surat perjanjian pemberian bantuan dan harus bersedia mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Sekolah mapan/kaya yang mampu secara ekonomis saat ini, memiliki penerimaan lebih besar dari BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tertentu sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Keputusan atas penolakan tersebut harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Bila mana sekolah terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin kelanjutan pendidikan tersebut.
5. **Ketentuan Yang Harus Diikuti Sekolah Penerima Dana BOS**

Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama menjelaskan bahwa sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Sekolah telah melaksanakan pendidikan gratis.
2. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas.[[24]](#footnote-24)

Dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas maka untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekolah telah melaksanakan pendidikan gratis bagi sekolah yang telah melaksanakan pendidikan gratis pada periode sebelumnya, maka sekolah tersebut harus tetap membebaskan semua bentuk pungutan iuran pada seluruh peserta didik.
2. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas bagi sekolah yang masih memungut pungutan, sumbangan, iuran pada periode sebelumnya dikarenakan terdapat selisih antara RAPBS (kebutuhan riil sekolah) dan BOS. Sekolah masih harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
3. Apabila sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan pungutan, sumbangan, iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisanya dari dana tersebut apabiala masih ada digunakan untuk mensubsidi siswa yang lain.
4. Bagi sekolah yang tidak terdapat siswa yang miskin maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi semua bentuk pungutan yang dibebankan pada orang tua siswa minimum senilai dan BOS yang diterima sekolah.

Bedasarkan penjelasan di atas maka sekolah yang berhak menerima dana BOS adalah semua sekolah yang setingkat SD dan SMP, baik Negeri maupun swasta diseluruh provinsi se-Indonesia. Di mana program paket A dan paket B dan SMP terbuka tidak termasud sasaran dari PKPS-BBM bidang pendidikan, karena hampir dari semua komponen dari tiga program tersebut telah dibiayai oleh pemerintah.

**4. Pemanfaatan Dana BOS**

1. Penerimaan dan pengeluaran
2. Dana BOS langsung dikirim ke nomor rekening rutin sekolah oleh lembaga penyalur kantor pos / bank.
3. Mengeluarkan dana berdasarkan permintaan pertanggung jawaban kegiatan diajukan kepada sekolah dengan melampirkan proposal kegiatan.
4. Pengambilan dana berikutnya oleh penanggung jawab dana yang diberikan sebelumnya kepada bendahara / guru.
5. Penerimaan dan pengeluaran dan dicatat dalam buku kas.
6. Penggunaan Dana

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kemnetrian Agama menjelaskan bahwa dana BOS digunakan untuk membiayai semua kebutuhan sekolah baik yang berupa fisik maupun non fisik.

Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.

Digunakan untuk biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran ulang. Termasuk didalamnya pengeluaran alat tulis, uang lelah, transport, dan konsumsi panitia pendaftaran siswa baru dan pendaftaran ulang siswa lama.

1. Buku tes pelajaran dan buku penunjang untuk koleksi di perpustakaan.

Pengadaan buku tes pelajaran dan buku pelajaran, buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan dilakukan oleh sekolah dengan melakukan perbandingan harga dan harus perhatiakn kualitasnya. Bahan yang tidak memenuhi standar harus ditolak.

1. Membeli bahan-bahan habis pakai

Digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar seperti buku tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris. Dana BOS dapat juga digunakan untuk keperluan sehari-hari sekolah.

1. Membiayai kegiatan siswa

Kegiatan siswa meliputi remedial, olah raga, kesenian, karya ilmiah, pramuka, palang merah. Dapat pula digunakan untuk kegiatan tersebut seperti pengeluaran alat tulis, bahan dan pengadaan materi termasuk uang lelah dan transport bagi guru yang menyelenggarakan kegiatan.

1. Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.

Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa seperti pengeluaran untuk honor pengawas, penulisan soal ujian, koreksi hasil ujian, panitia ujian, dan bahan pengadaan soal.

1. Pengembang profesi guru

Dapat digunakan untuk kegiatan penelitian, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Pengeluaran untuk kegiatan tersebut seperti honorarium nara sumber, penulis naskah materi paparan, honor peserta, pengadaan alat tulis, bahan pengadaan materi, transport dan konsumsi dapat digunakan dari dana BOS.

1. Membayar biaya perawatan sekolah

Digunakan untuk keperluan kegiatan ringan seperti pengecetan, perawatan atap yang bocor, pembetulan pintu dan jendela, pembetulan kamar mandi, dan perbaikan mobile (ruang kelas, ruang perpustakaan, dan laboratorium)

1. Pembayaran langganan daya dan jasa

Untuk membayar langganan listrik, air dan telepon yang ada di sekolah. Bila terdapat jaringa telepon dan listrik di sekolah belum berlangganan daya tersebut diperkenankan untuk membayar jaringan kesekolah dan tidak diperkenankan untuk membeli hanpone dan pulsa hanpone.

1. Membayar honor guru dan tenaga pendidikan honor sekolah yang tidak dibiayai pemerintah pusat dan daerah.

Digunakan untuk membayar honorarium GTT dan tenaga pendidikan serta PTT. Bagi guru PNS di sekolah negeri yang mengajar disekolah swasta diluar kewajiban jam mengajar disekolah negeri diperlukan sebagai tenaga pendidik honorer oleh sekolah swasta tersebut. Guru PNS yang ditugaskan oleh pemerintah disekolah swasta, diperlukan sebagaimana sekolah negeri. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS termasuk guru honorer dan tenaga kependidika honorer yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat atau daerah tidak diperkenankan diambil dari dana BOS (ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah)

1. Membantu siswa miskin untuk membiayai transportasi

Digunakan untuk biaya transport dari sekolah bagi siswa miskin. Bantuan biaya tersebut tidak dikenakan pajak, bantuan tersebut hanya diberikan pada siswa miskin dank arena biaya transportasi sehingga terancam tidak masuk sekulah. Komponen ini juga dapat berbentuk pembelian alat transportasi bagi siswa seperti sepeda, dan alat ini menjadi alat inventaris sekolah.

1. Biaya asrama/pondok/alat ibadah bagi santri salafiah

Digunakan untuk meringankan beban santri dalam pemondokan khususnya bagi santri yang mengikuti wajar diknasa 9 tahun. Dalam mengadakan peralatan ibadah yang harus diperhatikan adalah kualitas bahan yang baik dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan dana BOS

Dapat digunakan untuk biaya ATK, transport, surat-menyurat pengadaan dan penyusunan laporan (honor penyusunan laporan) dalam pengelolaan dana BOS

1. Bila seluruh komponen diatas telah dipenuhi pendanaan dari BOS danterdapat masih ada sisa dana maka dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mobiler sekolah.[[25]](#footnote-25)

**5. Pertanggung Jawaban Keuangan**

Dalam pertanggung jawaban dan BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencatat penerimaan, dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana.

a). Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah

* + - 1. Penggunaan dana BOS yang telah disepakati oleh kepala sekolah/dewan guru/ komite sekolah madrasah atau yayasan dituangkan dalam RAPBS dan ditanda tangani oleh kepala sekolah, ketua komite dan ketua yayasan.
      2. PABS (format BOS-K1)
      3. Rincian penggunaan dan perjenis anggaran (format BOS-K2)

b). Pengelolaan dan BOS berpedoman pada:

1. Ketentuan pembayaran atas APBN
2. Ketentuan pengadaan barang / jasa instansi pemerintah.
3. Ketentuan perpajakan
4. Ketentuan pembukuan keuangan Negara

c). Pembukuan

1. Pengelolaan dana BOS diwajibkan membuat pembukuan kas umum(format ke-3), buku pembantu kas tunai (format-BOS k4), buku pembantu bank (format BOS k-5) buku pembantu pajak (format BOS k-6) dan buku pembantu lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam pengeluaran buku kas umumdan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
3. Setiap akhir bulan buku kas umum dan buku pembantu ditutup oleh bendahara dan ketahui oleh kepala sekolah.

4. Uang tunai yang ada dikas tunai tidak lebih dari Rp.5 juta.

d). Bukti Pengeluaran

1. Setiap transaksi keuangan harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah
2. Bukti pengeluaran dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materi yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai
3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci
4. Uraian jenis barang /jasa yang dibayar dapat dipisahkan dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.
5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui oleh kepala sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara.[[26]](#footnote-26)
6. **Pelaporan**

Dalam aturan Kementrian Agama menjelaskan bahwa laporan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS. Untuk itu laporan pertanggung jawaban harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya
2. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan disuatu tempat yang aman dan mudah ditemukan disetiap saat.
3. Laporan penggunaan dana BOS dari penanggung jawab/ pengelolaan dana BOS ditingkat sekolah kepada tim PKPS-BBM Kab/Kota cukup format BOS-K2, sedangkan format BOS K-3, format BOS K-4, format BOS K-5 dan format BOS-K6 beserta dokumen pendukungnya diarsipkan disekolah .
4. Waktu pelaporan pertanggung jawaban keuangan tersebut disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.[[27]](#footnote-27)
5. **Hakekat Kualitas Pembelajaran**
6. **Kualitas Pembelajaran**
7. **Konsep Mutu (kualitas)**

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Mutu atau kualitas menitikberatkan fokusnya pada kepuasan pelanggan (konsumen).

Barang atau jasa yang dihasilkan diupayakan agar sesuai dengan keinginan pelanggan.Mutu atau kualitas juga dapat diartikan sebagai ukuran baik atau buruk suatu benda, taraf atau derajat. Pengertian mutu tersebut lebih mengedepankan mutu sebagai mutu barang atau jasa. Barang atau jasa yang berkualitas berarti juga berkualitas tinggi. Mutu adalah Sebuah filsosofis dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.

‘’Mutu bukanlah konsep yang mudah untuk didefinisikan apalagi untuk mutu jasa yang dapat dipersepsi secara beragam’’[[28]](#footnote-28). Mutu dapat didefinisikan beragam berdasarkan kriterianya sendiri seperti:

1. Melebihi dari yang dibayangkan dna diingnkan
2. Kesesuaian antara keinginan dan keyataan
3. Sangat cocok dengan pemakaian
4. Selalu ada perbaikan dna penyempurnaan
5. Dari awal tidak ada kesalahan
6. Membahagiaan pelanggan
7. Tidak ada cacat atau rusak

Mendefinisikan kualitas ke dalam dua perseptif yaitu persepektif kualitas absolute dan kualitas relative. Kualitas absolute berkaitan dengan produsen, menyangkut ukuran terbaik yang telah ditentukan. Sedangkan kualitas relative berkaitan dengan konsumen menyangkut kepuasan konsumen. Dengan demikian barang atau jasa yang diproduksi harus selalu mengutamakan kesesuaian anatara mutu absolute dan mutu relative. Artinya harus memuaskan pelanggan juga sesuai criteria atau spesifikasi yang telah ditentukanprodusen. Walaupun demikian mutu absout atau spesispikasi yang ditetapkan pada hakikatnya adalah untuk member kepuasan pada pelanggan. Jadi jelas bahwa kualitas berkaitan dengan kepuasan pelanggan.

Dalam tataran abstrak kualitas telah didefinisikan oleh dua pakar penting bidang mutu atau kualitas yaitu Joseph Juran dan Edward Deming. Mereka berdua telah berhasil menjadikan kualitas sebagai mindset yang berkembang terus dalam kajian managemen, khususnya managemen mutu. Kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan (*fitness for use)*, ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna, lebih jauh Juran mengemukakan lima dimensi kualitas yaitu rancangan *(design)*, kesesuaian (*conformance*), ketersediaan (*availability*), keamanan (*safety*), serta guna praktis (*field use*).

Tokoh lain yang mengembangkan managemen mutu atau kualitas adalah Edward Deming.

Menurut Deming meskipun kualitas mencakup kesesuaian atribut produk dengan tuntutan konsumen, namun kualitas harus lebih dari itu. Menurut Deming terdapat empat belas poin penting yang dapat membawa/membantu manager mencapai perbaikan dalam kualitas yaitu :

1. Menciptakan kepastian tujuan perbaikan produk dan jasa
2. Mengadopsi filosofi baru dimana cacat tidak bisa diterima
3. Berhenti tergantung pada inspeksi missal
4. Berhenti melaksanakan bisnis atas dasar harga saja
5. Tetap dan continue memperbaiki system produksi dan jasa
6. Melembagakan metode pelatihan kerja moderen
7. Melembagakan kepemimpinan
8. Menghilangkan rintangan antar departemen
9. Hilangkan ketakutan
10. Hilangkan/kurangi tujuan-tujuan jumlah pada pekerja
11. Hilangkan managemen berdasarkan sasaran
12. Hilangkan rintangan yang merendahkan pekerja jam-jaman
13. Melembagakan program pendidikan dan pelatihan yang cermat
14. Menciptakan struktur dalam managemen puncak yang dapat melaksanakan transformasi seperti dalam poin-poin di atas.[[29]](#footnote-29)

prinsip mutu merupakan sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Terdapat delapn prinsip mutu menurut ISO (Tim Dosen 2010:298) yaitu:

1. *Customer focused organization* (fokus pada pelanggan)
2. *Leadership* (kepemimpinan)
3. *Involvement of people* (keterlibatan orang-orang)
4. *Process approach* (Pendekata proses)
5. *System approach to management* (pendekatan system dalam manajemen)
6. *Continual invorentment* (peningkatan secara berkelaqnjutan)
7. *Factual approach to decision making* (pendekatan factual dalam pengambilan keputusan)
8. *Mutually beneficial supplier relationship* (hubungan yang saliang mengntungkan dengan supplier)

Riduwan memaparkan bahwa ukuran variable manajemen mutu dilihat dari perilakunya dalam mewujudkan pelayanan kepada stakeholder. Masih menurut Riduwan, dimensi variable manajmen mutu yaitu perencanaan strategis untuk kualitas, penerapan pengelolaan mutu, serta peningkatan pelayanan mutu.[[30]](#footnote-30)

Berdasarakan beberapa penjelasan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara absolute dan secara absolute dilihat dari sudut pandang pemberi layanan (barang atau jasa) yaitu mengenai ukuran tertentu yang sudah ditentukan. Sedangkan mutu secara relative dilihat dari sudut pandang pengguna layanan (konsumen) yaitu ukuran kepuasan terhadap kualiatas barang ataua jasa. Jika ditarik sebuah benag merah, maka pada dasarnya mutu absolute juga menyangkut kepuasan pelanggan. Hal ini karena ukuran terbaik yang ditetapkan pada dasarnya adalah ntuk member kepuasan kepada pelanggan.

1. **Konsep Pembelajaran**

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajran merupakan aktivitas yang paling utama lebih jelasnya memaparkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang diakukan oleh individu untuk memeperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dlaminteraksi dengan lingkungannya.

Proses interaksi antara pendidik dan peserta diidk menjadi sangat penting dalam pembelajaran karena tanpa adanya interaksi edukatif poses pemeblajaran tidak akan efektif. Hal ini karena komunikasi yang dihasilkan hanya satu arah yaitu dari pendiidk kepada peserta didik. Dalam UU No.20/2003 tetang  Sistem pendidikan Nasonal Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (UU No. 20/2003, Bab I Pasal Ayat 20).  Apabila dicermati proses interaksi siswa dapat dibina dan merupakan bagian dari proses pembelajaran, “Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi- kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu’’.[[31]](#footnote-31)

Pembelajaran bukan hanya berrati transfer informasi dari tetapi bagaimana membuat peserta didik agar bisa belajar secara maksimal. Peran guru tentu saja bukan hanya sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pembimbing dan pelayan siswa. Pembelajran merupakan upaya guru untuk membangkitkan yang berarti menyebabkan atau mendorong seseorang (siswa) belajar.

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa.  Dlam penegrtian ini tampak jelas bahwa pembelajaran itu proses yang kompleks, bukan hanya proses pemberian informasi yang disampaikan guru pada siswa. Ada serangkaian kegiatan yang disusun untuk membuat siswa bisa belajar. Serangkain kegiatan dalam pembelajaran tentu harus direncanakan terlebih dahulu juda harus disusun sebaik mungkin disesuaikan dengan konteks situasi, materi, kondisi siswa, dan ketersediaan media pembelajaran.

memaparkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yan dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Oleh karena itu pembelajran sebagai suatu proses harus dirancang, dikembangkan dan dikelola secra kreatif, dinamis, dengan menerapkan pendekatan multi untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa.  Dlam hal ini guru dituntut untuk kreatif dalam menyususn rencana pembelajaran yang akan diaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Variasi model pembelajaran harus dikuasai oleh guru dan tentu saja disesuaikan dengan materi pelajarannya.[[32]](#footnote-32)

Ciri utama dari pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan proses belajar siswa. Sedangkan komponen-komponen dalam pembelajaran adalah tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran. hakikatnya seorang pendidik adalah seorang fasilitator. Ia mmepasilitasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dlam proses pembelajaran.

Konsep pembelajaran berbeda dengan pengajaran. Pembelajaran bukan hanya transfer informasi dari guru kepada siswa tapi lebih luas. Hal ini sesuai dengan visi pendidikan UNESCO yaitu:

1. *Learning to think* (belajar berpikir)
2. *Learning to do* (belajar berbuat/hidup)
3. *Learning to live together* (belajar hidup bersama)
4. *Learning to be* (belajar menajdi diri sendiri)

Proses pembelajaran yang baik dilaksanakan  dengan metode Learning by doing. Hai dilaukan guna mencapai tujuan pendidikan dan pembelajran yag telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan suatu system pendiidkan dna pembelajaran yang mengembangkan cara berpikir aktif positif dan keterampilan yag memadai, memaparkan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut:

1. Pembelajaran sebagai usaha memeperoleh perubahan perilku. Prinsip ini mengandung akna bahwa viri utama proses pemeblajaran ialah adanya perubahan perilaku dalam diri individu. Perubahan perilaku tersebut mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:
   1. Perubahan yang disadari
   2. Perubahan yang bersipat kontinu
   3. Perubahan yang bersipat fungsional
   4. Perubahan yang bersipat positif
   5. Perubahan yang bersipat aktif
   6. Perubahan yang bersipat permanen
   7. Perubahan yang bersipat terarah
2. Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilaku sebagai hasil pemebelajaran adalah meliputi semua aspek perilaku dna bukan hanya satu atau dua aspek saja. Perubahan ini meliputi aspek-aspek perilaku kogkitif, konatif, afektif, dan motorik
3. Pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembelajaran merupakan aktivitas yang berkesinambungan. Di dalam aktivitas itu ada tahapan-tahapan aktivitas ynag sistematis dan terarah. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dinamis dna saling berkaitan. Pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan lingungan, jadi selama proses pemeblajaran itu berlangsung , individu akan senantiasa berada dalm berbagai aktivitas yang tida terlepas drai lngkungannya.
4. Proses pemeblajaran terjadi karena danya sesuatu tujua yang kan dicapai. Prinsip ini menandung makna bahwa aktivitas pembelajaran terjadi karena danya kebutuhn yang harus dipuaskan, dan adanya tujuan yang hendakdicapai. Pembelajarna kan terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan yang endorong dan ada sesuatu yang peru dicapi untuk memenuhi kebutuhanya.
5. Pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasaranya adalah kehidupa melalu situasi ang nyata. Dengan tujuan tertentu. Pembelajran merupakn interaksi individidu dengan lingkungannya sehingga banyak emmberikan pengalaman yang nyata. Perubaha perilaku dalam pembelajaran pada dasarnya merupkan pengalaman.

Enam ciri pembelajaran, yaitu:

1. Siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan,
2. Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran.
3. Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian,
4. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis informasi.
5. Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir.
6. Guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru.[[33]](#footnote-33)
7. **Kualitas Pembelajaran**

kualitas sekolah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Kultur sekolah merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, upacara-upacara, slogan-slogan, dan berbagai perilaku yang telah lama terbentuk di sekolah dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, baik secara sadar maupun tidak. Kultur ini diyakini mempengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, staf administrasi, siswa, dan juga orang tua siswa. Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan mendorong perilaku warga kearah peningkatan mutu sekolah, sebaliknya kultur yang tidak kondusif akan menghambat upaya menuju peningkatan mutu sekolah.

Berkaitan dengan komponen-komponen yang membentuk sistem pendidikan, komponen input diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. *Raw input*, yaitu siswa yang meliputi intelek, fisik-kesehatan, sosial-afektif dan *peer group*.
2. *Instrumental input*, meliputi kebijakan pendidikan, program pendidikan (kurikulum), personil (Kepala sekolah, guru, staf TU), sarana, fasilitas, media, dan biaya
3. *Environmental input*, meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial, unit kerja.

proses pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pendidikan yang dapat menentukan keberhasilan pembelajaran dan mutu pendidikan. Oleh karena itu untuk memperoleh mutu pendidikan yang baik, diperlukan proses pembelajaran yang berkualitas pula.

Dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya memuat tentang standar proses. Dalam Bab I Ketentuan Umum SNP, yang dimaksud dengan standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Bab IV Pasal 19 Ayat 1 SNP lebih jelas menerangkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemampuan sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Kualitas pembelajaran dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai baik-buruknya hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Sekolah dianggap bermutu bila berhasil mengubah sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses pembelajaran yang berlangsung hingga membuahkan hasil.

Kualitas pembelajaran merupakan hal pokok yang harus dibenahi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini guru menjadi titik fokusnya. Berkenaan dengan ini pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan akademik yang berupa interaksi komunikasi anatara pendidik dan peserta didik proses ini merupakan sebuah tindakan professional yang bertumpu padakaidah-kaidah ilmiah. Aktivitas ini merupakan kegiatan guru dalam mengaktifkan proses belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai metode belajar.

Berkaitan dengan pembelajaran yang bermutu, konsep mutu pembelajaran mengandung lima rujukan, yaitu:.

1. Kesesuaian meliputi indikator sebagai berikut: sepadan dengan karakteristik peserta didik, serasi dengan aspirasi masyarakat maupun perorangan, cocok dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi lingkungan, selaras dengan tuntutan zaman, dan sesuai dengan teori, prinsip, dan / atau nilai baru dalam pendidikan.
2. Pembelajaran yang bermutu juga harus mempunyai *daya tarik* yang kuat, indikatornya meliputi: kesempatan belajar yang tersebar dan karena itu mudah dicapai dan diikuti, isi pendidikan yang mudah dicerna karena telah diolah sedemikian rupa, kesempatan yang tersedia yang dapat diperoleh siapa saja pada setiap saat diperlukan, pesan yang diberikan pada saat dan peristiwa yang tepat, keterandalan yang tinggi, terutama karena kinerja lembaga clan lulusannya yang menonjol, keanekaragaman sumber baik yang dengan sengaja dikembangkan maupun yang sudah tersedia dan dapat dipilih serta dimanfaatkan untuk kepentingan belajar, clan suasana yang akrab hangat dan merangsang pembentukan kepribadian peserta didik.
3. Efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan tercapainya tujuan, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi, atau “*doing the right things*”. Pengertian ini mengandung ciri: bersistem (sistematik), yaitu dilakukan secara teratur, konsisten atau berurutan melalui tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan, sensitif terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan pernbelajar, kejelasan akan tujuan dan karena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya, bertolak dari kemampuan atau kekuatan mereka yang bersangkutan (peserta didik, pendidik, masyarakat dan pemerintah).
4. Efisiensi pembelajaran dapat diartikan sebagai kesepadanan antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan hasil yang diperoleh atau dapat dikatakan sebagai mengerjakan sesuatu dengan benar. Ciri yang terkandung meliputi: merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan model mengacu pada kepentingan, kebutuhan kondisi peserta didik pengorganisasian kegiatan belajar dan pembelajaran yang rapi, misalnya lingkungan atau latar belakang diperhatikan, pemanfaatan berbagai sumber daya dengan pembagian tugas seimbang, serta pengembangan dan pemanfaatan aneka sumber belajar sesuai keperluan, pemanfaatan sumber belajar bersama, usaha inovatif yang merupakan penghematan, seperti misalnya pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran terbuka yang tidak mengharuskan pembangunan gedung dan mengangkat tenaga pendidik yang digaji secara tetap. Inti dari efisiensi adalah mengembangkan berbagai faktor internal maupun eksternal (sistemik) untuk menyusun alternatif tindakan dan kemudian memilih tindakan yang paling menguntungkan.
5. Produktivitas pada dasarnya adalah keadaan atau proses yang memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dan lebih banyak. Produktivitas pembelajaran dapat mengandung arti: perubahan proses pembelajaran (dari menghafal dan mengingat ke menganalisis dan mencipta), penambahan masukan dalam proses pembelajaran (dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar), peningkatan intensitas interaksi peserta didik dengan sumber belajar, atau gabungan ketiganya dalam kegiatan belajar-pembelajaran sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik, keikutsertaan dalam pendidikan yang lebih luas, lulusan lebih banyak, lulusan yang lebih dihargai oleh masyarakat, dan berkurangnya angka putus sekolah.

Pembelajaran yang bermutu akan bermuara pada kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Secara sederhana kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran, proses pembelajran, serta evaluasi pembelajaran. Mutu pembelajaran  adalah  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa  tinggi  mutu interaksi  guru  den gan  siswa  dalam  proses  pembelajaran  dalam  rangka pencapaian  tujuan  tertentu.  Proses interaksi ini dimungkinkan karena mnausia merupakan mahluk social yang membutuhkan orang lain dlam kehiduannya. Dalam pendidikan disebut dengan interaksi edukatif, ayitu interaksi yang berlangsung dalm ikatan tujuan pendidikan. Kegiatan  belajar  mengajar  tersebut dilaksanakan  dalam  suasana  tertentu  dengan  dukungan  sarana  dan prasarana  pembelajaran  tertentu  tertentu  pula.  Oleh  karena  itu, keberhasilan  proses  pembelajaran  sangat  ter gantung  pada:  guru,  siswa, sarana  pembelajaran,  lingkungan  kelas,  dan   budaya  kelas.  Semua indikator  tersebut  harus  saling  mendukung dalam  sebuah  system  kegiatan pembelajaran  yang bermutu.

Dalam  proses  pembelajaran  yang  bermutu  terlibat  berbagai  input  pembelajaran seperti;  siswa  (kognitif,  afektif,  atau  psikomotorik),  bahan  ajar,  metodologi  (bervariasi sesuai kemampuan  guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasaran a dan sumber  daya  lainnya  serta  penciptaan  suasana  yang  kondusif.  Mutu  proses  pembelajaran ditentukan  dengan  metode,  input,  suasana,  dan  kemampuan  melaksan akan  manajemen proses  pembelaaran  itu  sendiri.  Mutu  proses  pembelajaran  akan  ditentukan  dengan seberapa  besar  mempuan  memberdayakan  sumberdaya  yang  ada  untuk  siswa  belajar secara  produktif.  Manajemen  sekolah,  dukungan  kelas  berfungsi  mensinkronkan  berbagai input  tersebut  atau  mensinergik an  semua  komponen  dalam  interaksi  (proses)  belajar mengajar  baik  antara  guru,  siswa  dan  sarana  pendukung  di  kelas  maupun  di  luar  kelas; baik  konteks  kurikuler  maupun  ekstra-kurikuler,  baik  dalam  lingkup  subtansi  yang akademis  maupun  yang  non-akademis  dalam  suasana  yang  mendukung  proses pembelajaran.[[34]](#footnote-34)

Mengacu pada PP No. 19 tahun 2005, standar proses pembelajaran yang sedang dikembangkan, maka lingkup kegiatan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Pembelajaran yang bermutu dihasilkan oleh guru yang bermutu pula. Kecakapan guru dalm mengelola proses pembelajran menjadi inti persoalannya. Tahapan-tahapan dalam proses pemeblajaran sedikitnya harus meliputi fase-fase berikut:

1. Menetapkan tujuan pembelajaran yang kan dicapai
2. Memilih dan melaksanakan metode yang tepat dan sesuai materi pelajaran serta memperhitungkan kewajaran metode tersebut dengan metode-metode yang lain
3. Memilih dan mempergunakan alat bantu atau media guna membnatu tercapainya tujuan
4. Melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran

Hal-hal di atas menjadi tugas guru. Guru dituntut untuk mmepunyai kecakapan dna pengetahuan dasar agar mampu melaksankaan tugsnya secara professional, pengetahuan dan kecakapan dasar yan harus dimilki seorang guru yaitu:

1. Guru harus mengenal setiap siswa. Karakteristik, kebutuhan, minat, tingkat kepandaian siswa harus bisa dipahami oleh guru.
2. Guru harus mempunyai kecakpaan dalam bimbingan terhadap siswa. Proses pemeblajaran didalamnya terdapat prose sbimbingan. Bimbingan ini dilaksanakan sebagai bentuk layanan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa dalam pemeblajaran. Dengan demikian dapat dibuat perencanaan yang baik atar dasar data tersebut.
3. Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahman yang luas menganai tujuan pendidikan dna tujuan pembelajran. Hal ini agar proses yang dilaksanakannya tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Guru harus mempunyai pengetahuan yang bulat menganai pelajran yang dipegangnya dna juga metode-metode yang sesuai.

Pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang efektif yang pada intinya adalah menyangkut kemampuan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan sangat menntukan mutu hasil pembelajaran yang akan diperoleh siswa.

Kualitas pembelajaran pada hakikatnya menyangkut kualitas proses dan kualitas hasil pemebalajaran. Kualitas proses pembelajaran diartikan sebagai kualitas atau mutu aktivitas pembelajaran yang dilaksankan oleh guru dan pesrta didik di kelas dan tempat lainnya. Sedangkan kualitas hasil pembelajaran adalah kualitas aktivitas pembelajaran yang terwujud dalam bentuk hasil belajar nyata yang di capai oleh peserta didik berupa nilai-nilai.

1. **Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pembelajaran**

Dalam upaya meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran tentu bukan hal yang mudah di raih, karena harus melalui beberapa tahap yang akan mengantar untuk menuju ketahap tertentu dalam proses pembelajaran. Menurut Mulyasa faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran yaitu:

1. Kebijakan
2. Minat
3. System pendidikan[[35]](#footnote-35)

Untuk lebih jelasnya maka faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

* 1. Kebijakan adalah suatu bentuk aturan yang telah dirancang dan digunakan menjadi acuan dalam pendidikan Nasional pasal 27 point B berbunyi: pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan prose pembelajaran. Dari hal di atas maka dapat ditunjukkan bahwa seluruh aspek dalam pendidikan telah di atur dalam undang-undang demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
  2. Minat merupakan kecenderungan untuk mengetahui sesuatu baik kepandaian, pengetahuan, keterampilan sehingga seorang dari berbagai pengetahuan dalam keterampilan akan membawa diri untuk berbuat secara maksimal demi pengembangan potensi yang dimiliki.
  3. Sistem pendidikan mencakup seluruh aspek pendidikan yang saling berkaitan, kerja sama untuk mencapai hasil yang sesuai harapan dengan kebutuhan yang telah ditentukan, komponen yang mencakup dalam sistem pendidikan adalah siswa alat peraga, guru dan lingkungan.

1. Ardiasmo, *Akutansi Sector Public,* (Penerbit Andi*,* Yogyakarta, 20010), h. 132 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sukrisno Agus, *Auditing Kantor Akuntan Public,* (Jilid Ii*,* Lembaga Penerbit UI, Jakarta, 2008 ), h. 182 [↑](#footnote-ref-2)
3. The Liang Gie, *Prilaku Organisasi Konsep Dan Aplikasi,* (Rajawali Pers, Jakarta, 20010) h.19 [↑](#footnote-ref-3)
4. Slamer Saksono, *Admiistrasi Kepegawaian,* (Kanisius*,* Yogyakarta, 2011), h. 57 [↑](#footnote-ref-4)
5. Handayaningrat, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan,* (Gunung Agung, Jakarta, 2006), h.76 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hidayat, *Konsep Dasar Dan Pengertian Efektivitas Serta Implementasi Hasil Pengukuran,* (Prisma, Jakarta, 20012), h. 15 [↑](#footnote-ref-6)
7. Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, (Aditiya Media Jakarta:2008), h. 2 [↑](#footnote-ref-7)
8. Kementrian Agama RI, *Buku Bantuan Operasional Sekolah*, (Jakarta, 2010), h.21-22 [↑](#footnote-ref-8)
9. Widjaya , *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen ,* (Bina Aksara , Jakarta ,2009), h. 8 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*. h. 7 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid* . h. 8 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid .* h. 9 [↑](#footnote-ref-12)
13. Nurjaka, *Pelajaran Ekonomi,* (Armico, Bandung, 2004), h. 12 [↑](#footnote-ref-13)
14. Widjaya, *Op. Cit* h.12 [↑](#footnote-ref-14)
15. Nurjaka, *Op. Cit* h. 13 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dik.Nas. dan Depag, *Buku Panduan Biaya Operasional* (Sekolah, Dep. Dik. Nas Dan Depag, Jakarta, 2006), h. 7 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*  h. 7 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid* h.7 [↑](#footnote-ref-18)
19. E. Mulyasa. *Kurikulum Berbasis kompetensi,* (remaja Rosdakarya. Bandung, 2007), h. 194 [↑](#footnote-ref-19)
20. Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan,* (Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2010), h. 78 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*  h. 8 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid* h.4 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid* h. 8 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid* h. 9 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid* h.124 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid* h. 129 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid* hal.38 [↑](#footnote-ref-27)
28. Engkoswara, *Adminsitrasi Pendidikan,* (Alfabeta, Bandung, 2010), hal. 304 [↑](#footnote-ref-28)
29. Edward D, *Total Quality Management In Education* ( Ahli Bahasa Ahmad Ali Riyadi), (IRCiSoD , Jogjakarta, 2007), hal. 224 S [↑](#footnote-ref-29)
30. Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Alfabeta , Bandung, 2008), hal. 24 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Sagala, S, Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Alfabeta, Bandung, 2007), hal. 62 [↑](#footnote-ref-31)
32. Sa’ud, U.S, *Inovasi Pendidikan*, (Alfabeta , Bandung, 2010), hal. 124 [↑](#footnote-ref-32)
33. Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional Layanan Dalam Meningkatkan Mutu pembelajaran.* (Alfabeta, Bandung, 2010), h. 33-34 [↑](#footnote-ref-33)
34. Umberto Sihombing, *EBTANAS Menjamin Mutu Pendidikan.* (Koprasi StatistikMekar Jakarta 2005), h. 32 [↑](#footnote-ref-34)
35. Mulyasa,*Kurikulum Berbasis Kompetensi,* (Roda Karya, Bandung, 20

    05), hal.24 [↑](#footnote-ref-35)